

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini, kemajuan teknologi dan keterbukaan perekonomian negara yang semakin besar menyebabkan banyak benturan kepentingan sehingga peran pemerintah menjadi sangat penting dan dibutuhkan untuk mengatur sistem perekonomian. Pemerintah sebagai organisasi sektor publik memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat dan meningkatkan pelayanan tersebut. Atas dasar pelayanan pemerintah kepada masyarakat ini, pemerintah harus memberikan pertanggungjawaban dari semua kinerja dan aktivitasnya kepada masyarakat. Setiap pemerintah daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah ini didasarkan pada aturan, ketentuan, atau dasar hukum yang berlaku untuk menilai apakah yang bersangkutan telah berhasil melaksanakan tugasnya. Pelaporan keuangan ini juga bertujuan untuk menyajikan sejumlah besar data dan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang terlibat dan masyarakat umum untuk mendukung prinsip-prinsip akuntabilitas. Oleh karena itu, laporan keuangan harus disajikan secara sederhana agar mempermudah pemahaman pembaca laporan.

Meskipun laporan keuangan sudah dibuat secara sederhana dan lebih umum untuk semua pihak (*general purposive*), namun tidak semua pemangku kepentingan dapat menginterpretasikan laporan keuangan tersebut dengan baik. Maka, diperlukan analisis laporan keuangan dalam memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan dengan baik untuk para pengguna. Analisis laporan keuangan merupakan salah satu cara atau metode yang bertujuan untuk mengamati, menilai, dan mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Analisis laporan keuangan bertujuan untuk akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi, dan evaluasi kinerja (Surachman dan Handayani, 2020:31). Mardiasmo (2016:121) mengatakan bahwa pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk dapat memenuhi tiga tujuan, yaitu untuk melakukan perbaikan terkait kinerja pemerintah daerah, mempermudah pengalokasian sumber daya dan pengambilan keputusan, serta dapat mewujudkan pertanggungjawaban publik dan membuat komunikasi kelembagaan menjadi lebih baik. Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu entitas pemerintahan daerah dengan potensi yang besar memiliki daya tarik tersendiri untuk dibahas kinerja keuangannya.

Kabupaten Bojonegoro adalah daerah yang berada di Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah Kabupaten Bojonegoro adalah 230.706 ha dan memiliki jumlah penduduk pada tahun 2019 sebesar 1.331.077 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 1.344.038 jiwa. Wilayah Kabupaten Bojonegoro terbagi menjadi 28 kecamatan, meliputi 11 kelurahan dan 419 desa. Bojonegoro sangat kaya akan potensi. Diketahui bahwa

tambang minyak bumi dan gas alam di Kabupaten Bojonegoro tepatnya di Kecamatan Ngasem diperkirakan mencapai 126 juta barel (Ibrohim, 2015).

Seluruh wilayah di Kabupaten Bojonegoro telah menjadi wilayah eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan gas alam (Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, 2020). Bahkan diperkirakan 25% cadangan pasti minyak Indonesia saat ini berada di kawasan Kabupaten Bojonegoro. Pendapatan dari minyak bumi dan gas alam pada tahun 2018 mencapai Rp 27,7 Triliun sehingga dana bagi hasil Kabupaten Bojonegoro juga melimpah (Nugroho, 2020).

Berhubungan dengan tugas penegakan sistem pertanggungjawaban atau akuntabilitas keuangan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro wajib menyampaikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan yang dicapai. Laporan keuangan yang biasa digunakan dalam akuntansi sektor publik adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dilansir dari Berita Bojonegoro, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berhasil meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (Nurchahyo, 2020). Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersebut adalah yang ketujuh kalinya diraih Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2013.

Dalam rangka mempertahankan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan ini, proses analisis ini memerlukan cara tertentu yang baik dan tepat agar dapat bermanfaat bagi pengambil kebijakan. Dalam melakukan analisis laporan keuangan

sektor publik, terdapat beberapa alat analisis yang dapat digunakan untuk melihat kinerja dan kondisi keuangan pemerintah daerah. Secara garis besar, analisis dapat dilakukan baik dengan melakukan perbandingan antar komponen maupun antar laporan keuangan, serta melakukan analisis rasio.

Karya Tulis Tugas Akhir ini bertujuan untuk menganalisa laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro yang berfokus pada tahun 2019 dan didukung dengan data-data tambahan tahun 2018, 2020, dan 2021. Karya Tulis Tugas Akhir ini akan meninjau rasio keuangan daerah dan perbandingan antar komponen maupun antar laporan keuangan. Karya Tulis Tugas Akhir ini mengambil judul “ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana analisis laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro terutama ditinjau dari rasio keuangan daerah dan perbandingan antar komponen maupun antar laporan keuangan?
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dibandingkan dengan pemerintah daerah lain yang memiliki karakteristik dan potensi yang mirip (Pemerintah Kabupaten Blora)?
3. Apa rencana dan strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penyusunan karya tulis ini adalah:

1. Mengetahui analisis laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro terutama ditinjau dari rasio keuangan daerah dan perbandingan antar komponen maupun antar laporan keuangan.
2. Mengetahui perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan pemerintah daerah lain yang memiliki karakteristik dan potensi yang mirip (Pemerintah Kabupaten Blora).
3. Mengetahui rencana dan strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir ini akan memfokuskan ruang lingkup pembahasan terkait analisis laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro, yang berfokus pada tahun 2019 dan didukung dengan data-data tambahan tahun 2018, 2020, dan 2021. Laporan keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ini akan dibandingkan dengan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Blora terutama tahun 2019 karena kedua daerah ini memiliki persamaan karakteristik masyarakat, potensi yang mirip terkait potensi minyak, dan lain-lain. Penulisan dilakukan berdasarkan peraturan dan modul analisis laporan keuangan sektor publik.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai analisis laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya analisis rasio keuangan daerah dan perbandingan antar komponen maupun antar laporan keuangan. Selain itu, karya tulis ini diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi instansi atau pemerintah daerah

Karya tulis ini dapat menjadi bahan pertimbangan atau bahan masukan untuk dapat membandingkan kondisi laporan keuangan di instansi. Selain itu, karya tulis ini juga dapat mengevaluasi kualitas laporan keuangan agar mempertahankan atau meningkatkan opini laporan keuangan dan pemerintah daerah dapat menyusun strategi untuk tahun mendatang.

b. Bagi akademisi

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori. Selain itu, karya tulis ini juga dapat dijadikan bahan referensi mengenai analisis laporan keuangan pemerintah daerah untuk penelitian lanjutan agar hasil penelitian menjadi lebih baik dari sebelumnya.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum terkait penulisan yang berisi tentang latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penulisan karya tulis, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan dalam menyusun karya tulis ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menjelaskan tentang kerangka teori yang bersifat umum dan khusus, digunakan untuk penyusunan karya tulis yang terdiri dari berbagai macam sumber atau penelitian terdahulu. Bab ini berisi pemahaman teori analisis laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan alat analisis untuk laporan keuangan daerah dan analisa rasio keuangan daerah yang akan digunakan dalam menganalisis kinerja atau laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metode pengumpulan data, gambaran umum terkait objek, ringkasan kinerja, dan hasil pembahasan masalah. Gambaran umum yang dibahas adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro, kinerja terkini, rencana, dan strategi dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Hasil pembahasan disertai dengan data dan fakta yang relevan dan valid. Pembahasan masalah didasarkan pada data dan fakta yang didapatkan dari laporan keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang berfokus pada tahun 2019 dan didukung dengan data-data tambahan tahun 2018, 2020, dan 2021.

Laporan keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ini akan dibandingkan dengan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Blora yang berfokus pada tahun 2019 karena kedua daerah ini memiliki persamaan karakteristik masyarakat, potensi yang mirip terkait potensi minyak, dan lain-lain.

Rencana hasil pembahasan meliputi perbandingan antar komponen dan antar laporan keuangan yang terdiri dari analisis horizontal dan analisis vertikal, perubahan laporan keuangan (*change of financial statement*), per-komponen laporan keuangan, analisis tren, dan analisis sumber dana serta penggunaannya. Selain itu, pembahasan juga terkait mengenai analisis ketaatan peraturan, analisis atas data pada neraca, dan analisis atas data pada laporan realisasi anggaran. Pembahasan masalah terkait analisis rasio hasil penelitian meliputi independensi (rasio kemandirian dan rasio ketergantungan), kebijakan prioritas dan penggunaan sumber daya (rasio pendapatan asli daerah terhadap belanja, rasio keserasian, rasio belanja terhadap jumlah penduduk), likuiditas dan solvabilitas, evaluasi kinerja pemerintah (rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, *tax ratio*, *tax per capita*, rasio SiLPA), dan kemampuan bayar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (*debt service coverage ratio*, ruang fiskal, dan keseimbangan primer).

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pembahasan pada BAB III tentang kinerja keuangan pemerintah daerah juga perkembangannya dan perbandingan antara daerah yang memiliki kemiripan karakteristik dan potensi.